

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Jika dilihat dari urgensi penelitian, mengangkat dari permasalahan yang terjadi akibat adanya Tindakan maladministrasi yang berupa penundaan berlarut yang dilakukan oleh Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang mana hal tersebut tidak mencerminkan bentuk tata kelola pemerintahan yang baik, dengan ingin mengetahui bagaimana kinerja Ombudsman dalam penanganan kasus dugaan maladministrasi dengan menggunakan teori Kinerja menurut Robbins dengan lima indikator. Sehingga berdasarkan hasil eksplorasi dari penulis terhadap kinerja ombudsman republik indonesia dalam penanganan kasus dugaan maladministrasi (studi pada penundaan berlarut oleh pemerintah penukal abab lematang ilir (PALI)) sudah terbilang cukup baik dengan adanya 2 indikator yang memang sudah baik dan 3 indikator yang dinilai cukup baik. Argumentasinya adalah pada indikator Kualitas Kerja, Ombudsman telah menunjukkan prosedur sesuai dengan SOP, mendorong pelaksanaan putusan pengadilan, dan meningkatkan kapasitas pegawai dengan melakukan pelatihan. Selain itu pada indikator Kuantitas, meskipun menghadapi tantangan keterbatasan jumlah pegawai terhadap tingginya laporan masyarakat, Ombudsman tetap berupaya meningkatkan efektivitas dengan mekanisme verifikasi dan pendekatan kooperatif terhadap pihak terlapor. Namun, beban kerja yang tinggi masih menjadi kendala yang perlu diatasi lebih lanjut.

Argumen selanjutnya pada indikator Ketepatan Waktu, Ombudsman telah menunjukkan komitmen tinggi dalam menyelesaikan laporan masyarakat tepat waktu, termasuk dengan memberikan rekomendasi berbasis kemampuan pihak terlapor. Pendekatan proaktif, seperti komunikasi langsung, membantu mitigasi penundaan, menjadikan aspek ini dinilai baik meskipun terdapat tantangan. Selain itu pada indikator Efektivitas Ombudsman mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal meskipun terbatas dan menghasilkan rekomendasi hukum yang kuat. Respon positif dari pihak terlapor menunjukkan efektivitas yang baik, meskipun implementasi terkadang bergantung pada kompleksitas kasus dan niat baik pihak terkait. Yang

terakhir pada indikator Kemandirian, Ombudsman menjaga independensi dalam menjalankan tugas dengan keputusan yang bebas dari tekanan, transparan, dan akuntabel. Langkah ini menunjukkan profesionalisme yang memastikan kredibilitas lembaga tetap terjaga sebagai Lembaga yang memang independent.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab IV yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan Kinerja Ombudsman dalam Penanganan Kasus Dugaan Maladministrasi. Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat diterapkan baik secara teoritis maupun praktis:

5.2.1 Saran Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya, bisa disarankan agar beberapa sumber dan referensi yang akan digunakan dalam penelitian dipelajari secara menyeluruh. Khususnya berkaitan dengan Kinerja Ombudsman dalam Penanganan Kasus Dugaan Maladministrasi.
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan dapat lebih menggali teori-teori yang relevan harus digali lebih dalam, khususnya tentang kinerja ombudsman.

5.2.2 Saran Praktis

Saran untuk Ombudsman Republik Indonesia perlu meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan berkelanjutan dan mengadopsi teknologi untuk mempercepat penanganan laporan. Hubungan yang lebih kooperatif dengan instansi terlapor harus diperkuat guna meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi. Transparansi dapat ditingkatkan melalui akses informasi laporan yang real-time, sementara evaluasi rutin SOP diperlukan agar tetap responsif terhadap kebutuhan publik. Selain itu, sosialisasi lebih luas tentang hak masyarakat dan mekanisme pengaduan dapat mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan.